



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

RENCANA KERJA (RENJA-2023)



**Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku - Liwa - Lampung Barat
Telp. (0728) 21164 - Fax. (0728) 21164
Kode Pos 34811
2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang merupakan implementasi tahunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian besar harapan kami agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan bagi yang memerlukan.

Liwa, Maret 2022

Pit. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUZAKAR, SE

Pembina TK I

NIP. 19660512 198603 1 004

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Maksud dan Tujuan	4
Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
Program, Kegiatan dan SubKegiatan	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	22
4.1. Rencana Kerja.....	22
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	26
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja OPD.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD disusun dengan mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal Perangkat Daerah untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan danaindikatif,
- Renstra Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraanmaju;
- Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periodesebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk mewedahi hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Forum Perangkat Daerah serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh Perangkat Daerah didaerah yang bersangkutan. Rencana Kinerja (Renja) perangkat daerahBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala

prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja perangkat daerah agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur.

Lebih Lanjut perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.

- b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

- Program, Kegiatan dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian RenstraOPD

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang pada tahun anggaran 2021 masih bernomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2021 dalam Renja Perangkat Daerah pagu anggaran untuk belanja langsung diluar gaji dan tunjangan pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp. 2.220.860.000,-Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut, dilakukan lagi perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran dan program prioritas Bupati maka sebagian besar OPD dilakukan rasionalisasi anggaran terutama yang program yang telah tercapai namun dengan tetap memperhatikan ketercapaian dan kelanjutanketercapaian.

Virus corona yang mewabah dan menjadi pandemi dunia di awal tahun 2020 hingga saat ini tidak terkecuali di Kabupaten Lampung Barat banyak mempengaruhi sendi kehidupan warga masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan perangkat daerah tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya kebijakan kepala daerah yang didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan penataan anggaran dalam rangka penanganan wabah Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan refocussing untuk penanganan covid-19 dan bantuan sosial.

Penyesuaian/refocussing beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan juga pergeseran untuk menunjang operasional perangkat daerah akhirnya dalam APBD Perubahan diajukan pengurangan dan pergeseran anggaran. Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 setelah APBD-Perubahan adalah sebesar Rp. 4.937.111.352,-. terealisasi sebesar Rp. 4.786.161.752,- atau 96,64persen. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 5 Program, 11 kegiatan dan 34 subkegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja perangkat daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatantahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	85% - >100%	Sangat Berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat terlihat dalam tableberikut ini :

Tabel A.1

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah konflik SARA yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$	100%	100%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah konflik politik yang ditangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$	100%	100%

Tabel 6.3

Sasaran Dan Indikator Sasaran serta Formulasi Perhitungan Target Untuk Kepala Seksi(Eselon IV)

NAMAPROGRAM	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET	REALISASI
Pengembangan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	Jumlah pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan/Jml peserta sosialisasi x 100%	100%	75 %
Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya peran serta organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	Jumlah organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah tahun N - Jumlah organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah tahun N-1/-N x 100%	20 %	20 %
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat	Persentase peningkatan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat	Jumlah masyarakat yang meningkat ketahanan ekonomi sosial dan budaya nya tahun N - pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan N-1/N x 100%	20 %	20 %
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan aparaturnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	Jumlah penanganan konflik sosial tahun N - penanganan konflik sosial N -1/-N x 100%	20 %	20 %
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah pemilih yang berpartisipasi /Jumlah data pemilih x 100%	100%	100%

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dikategorikan “Cukup Baik”. Dengan demikian diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur-unsur efektif dan efisien.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada terciptanya kondusivitas wilayah dalam rangka menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik disamping itu penguatan karakter melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan Bela Negara serta pendidikan politik masyarakat sehingga yang dapat berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI perlu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Berpedoman pada isu strategis yang terurai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim

sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 telah dilakukan rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD. Hal tersebut dilaksanakan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun selaras dengan Rancangan RKPD. Reviu dilaksanakan penyelarasan Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat:

“Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat”

Indicator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama

2. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

➤ **Sasaran 1** : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pengurangan Konflik SARA, target tahun 2023 sebesar 100%.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut menggunakan formulasi penghitungan yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Yang ditangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Konflik}}$$

➤ **Sasaran 2** : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Dengan indicator :

- 1) Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi, target pada tahun 2023 sebesar 0 % hal ini dikarenakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pilkada menjadi indicator keberhasilan kinerja sasaran, akan tetapi kinerja program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut harus tetap dilaksanakan baik setiap tahun. Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih}}$$

- 2) Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah, target tahun 2023 sebesar 5.26%.
Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang terdata} \times 100\%}{\text{Jumlah Ormas, Orpem dan LSM}}$$

3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang ddikenal dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 taun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Lampung Barat tahun 2017-2022, Menyelenggarakan Musrenbang kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Lampung Barat.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja OPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan.

- a. Data usulan dari kecamatan yang difasilitasi dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan
- b. Data usulan dari OPD yang tertuang dalam RENJA awalOPD
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten Lampung Barat, yaitu hasil dari Forum Gabungan OPD dimana usulan Kecamatan dan usulan OPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG
- d. Renja akhir OPD merupakan hasil dari Musrenbang tingkat kabupaten Lampung Barat yang sudah mempunyai kode rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan paguindikatif.

Penyusunan program/kegiatan dalam rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah semestinya menampung usulan dari para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat, LSM asosiasi-asosiasi dan pihak terkait lainnya, namun untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam tidak terdapat program/kegiatan yang yang merupakan usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Lampung Barat dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan maka perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan. Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi; (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat; (iii) pengurangan kemiskinan; (iv) pengurangan tingkat kesenjangan antar daerah; (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan; (vi) perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang mendatang yang sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta didasarkan pada isu–isu dan analisis strategis. Penetapan tujuan adalah untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memberikan arah bagi program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur perangkat daerah sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan Rencana Pembangunan Daerah. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan

dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah:

Tujuan :

“Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat”

Indikator Tujuan :

“Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama “

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek dari tujuan (bulan/triwulan/semester/tahun). Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis, yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Keberhasilan pencapaian berbagai sasaran sangat penting karena hal ini menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang, meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi serta sebagai alat pemicu semua bagian dari organisasi. Dengan demikian agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus memiliki aktor spesifik, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil.

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal, maka untuk merealisasikan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah dijabarkan kedalam tujuan, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu dirumuskan sasaran-sasaran.

Adapun sasaran dan Indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang tertera dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator : Persentase Pengurangan Konflik SARA

Sasaran 2 : Meningkatkan kesadaran politik masyarakat

- Indikator : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti PestaDemokrasi.
2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.

**Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung
Barat**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	(84.10) Sangat Baik	(84.15) Sangat Baik	(84.20) Sangat Baik	(84.25) Sangat Baik

**Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung
Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi		86%		
			Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5.26%	5.54%	5.82%	6.09%

3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 antara lain :

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 4. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Sub Kegiatan :**
1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada untuk tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah yang direncanakan akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 42 subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub

- Kegiatan :**
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan: 1.**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub**

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM : **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- Sub Kegiatan :** 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
4. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Sub Kegiatan :** 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 8.115.208.000,-** (*delapan milyar seratus lima belas juta dua ratus delapan ribu rupiah*).

TABEL DETAIL SUBKEGIATAN TAHUN 2023

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHUSUS SUBKEGIATAN TAHUN 2023
1	2	3
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2024
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2023
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2024
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2023
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2023
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2023 sejumlah 14 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2023

1	2	3
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2023
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol

1	2	3
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2023
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah Pusat/Daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Balik Bukit, Sekincau, Sumber Jaya, Suoh
		Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu ; Kec. Balik Bukit, Air Hitam, BNS, dan Suoh
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)
		Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit
		Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1	2	3
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yang akan menjadi Anggota Pemantau Pemilu/Tim Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2022 yang akan bertugas pada masing-masing TPS sebanyak 991 orang (asumsi jumlah TPS sebanyak 991 berdasarkan data TPS pada Pemilu Tahun 2017)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.. - Melaksanakan kegiatan sosialisasi kelembagaan politik kepada pemilih pemula
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hibah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Laporan Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat

1	2	3
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan dilaksanakan dalam bentuk kajian akademik dan pemetaan P4GN di Lampung Barat
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta</p> <p>Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 12 Bulan</p> <p>Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Kebun Tebu, Kec. Sekincau, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec. Balik Bukit dan Kec. Lumbok Seminung. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang</p> <p>Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat</p>
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Deradikalisasi paham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sekincau dan Kec. BNS</p> <p>Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat</p> <p>Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.</p> <p>Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat</p>

1	2	3
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Sumber Jaya, Suoh, Way Tenong dan Sukau
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, Maret 2022

Pit. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUZAKAR, SE

Pembina TK I

NIP. 19660512 198603 1 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2022	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2021)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S.D. TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		-							
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100 %	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100 %
8 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	50 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	10 Dokumen	50 Dokumen	100 %
8 01 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	15 Dokumen	100 %
8 01 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %
8	01	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %
8	01	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %
8	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	5 Dokumen	100 %
8	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	10 Dokumen	100 %
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di susun	35 Dokumen	21 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	7 Dokumen	37 Dokumen	105.71 %
8	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	30 Orang	6 Orang	7 Orang	116.67 %	7 Orang	44 Orang	110 %

1					2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	5	Dokumen	100	%
8	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10	Dokumen	6	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	%	2	Dokumen	12	Dokumen	120	%
8	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	2	Dokumen	10	Dokumen	100	%
8	01	01	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	2	Dokumen	10	Dokumen	100	%
8	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahnya	15	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	100	%	3	Orang	15	Orang	100	%
8	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	100	%	3	Orang	15	Orang	100	%
6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahnya	5	Sub Organisasi	5	Sub Organisasi	5	Sub Organisasi	5	Sub Organisasi	100	%	5	Sub Organisasi	5	Sub Organisasi	100	%

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
8	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	51	Jenis	39	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	100	%	12	Jenis	63	Jenis	123.53	%		
8	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	56	Jenis	40	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	100	%	8	Jenis	56	Jenis	100	%		
8	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	24	SKHU	20	SKHU	4	SKHU	4	SKHU	100	%	4	SKHU	28	SKHU	116.67	%		
8	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42	Jenis	35	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	100	%	7	Jenis	49	Jenis	116.67	%		
8	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167	Paket	155	Paket	30	Paket	30	Paket	100	%	22	Paket	207	Paket	123.95	%		
8	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	89	Unit	6	Unit	31	Unit	31	Unit	100	%	0	-	37	Unit	41.573	%		
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	0	0	2	Unit	50	%		
8	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31	Unit	2	Unit	9	Unit	9	Unit	100	%	0	0	11	Unit	35.48	%		
8	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58	Unit	3	Unit	21	Unit	21	Unit	100	%	0	0	24	Unit	41.37	%		
8	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan urusan pemerintahan daerahnya	3	Sub Organisasi	3	Sub Organisasi	3	Sub Organisasi	3	Sub Organisasi	100	%	3	Sub Organisasi	3	Sub Organisasi	100	%		

1					2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
8	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000	Surat	3,000	Surat	1000	Surat	1785	Surat	178.5	%	1000	Surat	5785	Surat	115.7	%
8	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	Rekening	12	Rekening	4	Rekening	4	Rekening	100	%	4	Rekening	20	Rekening	100	%
8	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	Sub Organisasi	4	Sub Organisasi	4	Sub Organisasi	4	Sub Organisasi	100	%	4	Sub Organisasi	12	Sub Organisasi	60	%
8	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	51	Unit	33	Unit	18	Unit	18	Unit	100	%	13	Unit	64	Unit	125.49	%
8	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	15	Unit	5	Unit	5	Unit	100	%	5	Unit	25	Unit	125	%
8	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	Paket	15	Paket	12	Paket	12	Paket	100	%	7	Paket	34	Paket	125.92	%
8	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Gedung	3	Gedung	1	Gedung	1	Gedung	100	%	1	Gedung	5	Gedung	125	%
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	80	%	34	%	100	%	90.91	%	90.91	%	100	%	50.56	%	63.2	%

1					2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta Diskusi Politik dan sosialisasi politik	1300	orang	500	orang	100	orang	100	orang	100	%	750	orang	1350	orang	103.8	%
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Berkas Partai Politik Penerima Bantuan keuangan yang diverifikasi	50	Partai Politik	30	Partai Politik	10	Partai Politik	10	Partai Politik	100	%	10	Partai Politik	50	Partai Politik	100	%
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100	%	50	%	51,25	%	100	%	100	%	100	%	57.08	%	57.08	%
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan jumlah buku	500, 800	Buku, Orang	100, 400	Buku, Orang	100, 100	Buku, Orang	100, 100	Buku, Orang	100	%	100, 100	Buku, Ormas	225, 517	Buku, Orang	57.08	%
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah buku	500	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	%	25	buku	225	buku	45	%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	105.15 %	105.15 %
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan	97 laporan	57 laporan	30 laporan	30 laporan	100 %	15 laporan	102 laporan	105.15 %
8	01	06	2.02	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda	36 laporan	18 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %		30 Laporan	83.33 %
8	01	06	2.02	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Tim Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/WNA	57 laporan	39 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %	11 Laporan	68 Laporan	119.29 %
8	01	06	2.02	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		4					4 Laporan	4 Laporan	100 %

LAMPIRAN II
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)		Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Target	Pagu Indikatif (Rp.)			Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.45 Poin	10,845,313,024	75,24 Poin	75,24 Poin	75,85 Poin	2,326,964,237	Kab. LB	DAU			Aparatur	76.05 Poin	2,565,860,661	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	60 Dokumen	187,751,943	30 Dokumen	39 Dokumen	15 Dokumen	37,223,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	15 Dokumen	40,945,300	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	31,215,654	9 Dokumen	11 Dokumen	4 Dokumen	3,494,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	4 Dokumen	3,843,400	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	16,197,090	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	3,490,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Dokumen	3,839,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	10,929,555	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2,355,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Dokumen	2,590,500	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	15,593,760	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	3,360,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Dokumen	3,696,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	12,994,800	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2,800,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Dokumen	3,080,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	14,985,789	3 laporan	5 laporan	2 laporan	3,229,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	2 laporan	3,551,900	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	85,835,295	6 laporan	7 laporan	5 laporan	18,495,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	5 laporan	20,344,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	76 Dokumen	7,952,507,753	15 Dokumen	52 Dokumen	19 Dokumen	1,713,533,237	Kab. LB	DAU			Aparatur	19 Dokumen	1,884,886,561	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	7,904,241,353	30 Orang	37 Orang	14 Orang	1,703,133,237	Kab. LB	DAU			Aparatur	14 Orang	1,873,446,561	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	10,989,888	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2,368,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Dokumen	2,604,800	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01. 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Doku men	15,686,580	6 Doku men	8 Doku men	2 Doku men	3,380,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	2 Doku men	3,718,000	Badan Kesbangpol
8.01.01. 1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Doku men	21,589,932	6 Doku men	8 Doku men	2 Doku men	4,652,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	2 Doku men	5,117,200	Badan Kesbangpol
8.01.01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahnya	24 Orang	68,000,000	6 Orang	12 Orang	6 Orang	8,000,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	6 Orang	15,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.01. 1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	68,000,000	6 Orang	12 Orang	6 Orang	8,000,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	6 Orang	15,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahnya	240 Sub Organ isasi	913,894,582	5 Sub Organ isasi	5 Sub Organ isasi	5 Sub Organ isasi	196,917,600	Kab. LB	DAU			Aparatur	5 Sub Organ isasi	216,609,360	Badan Kesbangpol
8.01.01. 1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	48 Jenis	10,041,268	39 Jenis	51 Paket	12 Jenis	2,163,600	Kab. LB	DAU			Aparatur	12 Jenis	2,379,960	Badan Kesbangpol
8.01.01. 1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	56 Jenis	84,048,510	40 Jenis	56 Paket	14 Jenis	18,110,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	14 Jenis	19,921,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	16 SKHU	31,465,980	20 SKHU	24 Paket	4 SKHU	6,780,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	4 SKHU	7,458,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Jenis	16,818,984	35 Jenis	42 laporan	12 Jenis	3,624,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	12 Jenis	3,986,400	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Paket	771,519,840	155 Paket	167 laporan	18 Paket	166,240,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	18 Paket	182,864,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	88 Unit	498,536,220	6 Unit	19 Unit	22 Unit	107,420,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	22 Unit	118,162,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	109,109,910	1 Unit	2 Unit	2 Unit	23,510,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	2 Unit	25,861,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	75,648,300	2 Unit	2 Paket	10 Unit	16,300,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	10 Unit	17,930,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	313,778,010	3 Unit	15 Unit	10 Unit	67,610,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	10 Unit	74,371,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan urusan pemerintahan daerahnya	3 Sub Organisasi	653,570,681	3 Sub Organisasi	3 Sub Organisasi	3 Sub Organisasi	140,825,400	Kab. LB	DAU			Aparatur	3 Sub Organisasi	154,907,940	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Surat	7,889,700	3000 Surat	4785 Surat	1000 Surat	1,700,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1000 Surat	1,870,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Rekening	66,551,940	4 Rekening	16 Rekening	4 Rekening	14,340,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	4 Rekening	15,774,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Sub Organisasi	579,129,041	4 Sub Organisasi	8 Sub Organisasi	1 Sub Organisasi	124,785,400	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Sub Organisasi	137,263,940	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	72 Unit	571,051,845	33 Unit	51 Unit	18 Unit	123,045,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	18 Unit	135,349,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	442,774,605	15 Unit	20 Unit	5 Unit	95,405,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	5 Unit	104,945,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 peralatan	35,457,240	15 peralatan	27 Unit	12 peralatan	7,640,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	12 peralatan	8,404,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Gedung	92,820,000	3 Gedung	4 Unit	1 Gedung	20,000,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Gedung	22,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	95 Persen	2,538,285,562	75 Persen	75 Persen	80 Persen	546,601,500	Kab. LB	DAU				85 Persen	601,261,650	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	95 Persen	2,538,285,562	75 Persen	75 Persen	80 Persen	546,601,500	Kab. LB	DAU			Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon	85 Persen	601,261,650	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.02. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 -	940,152,896	- -	- -	500 -	202,575,500	Kab. LB	DAU				500 -	222,833,050	Badan Kesbangpol
8.01.02. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang	1,540,932,666	300 Orang	400 Orang	100 Orang	332,026,000	Kab. LB	DAU				100 Orang	365,228,600	Badan Kesbangpol
8.01.02. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48 -	57,200,000	- -	- laporan	12 -	12,000,000	Kab. LB	DAU				12 -	13,200,000	Badan Kesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase meningkatnya etika dan budaya politik Pengurus Partai Politik	95 Perse n	5,923,139,976	75 Perse n	75 Perse n	80 Perse n	1,514,707,272	Kab. LB	DAU				85 Perse n	1,698,550,149	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase meningkatnya etika dan budaya politik Pengurus Partai Politik	95 Perse n	5,923,139,976	75 Perse n	75 Perse n	80 Perse n	1,911,345,272.	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat dan Partai Politik	85 Perse n	1,698,550,149	Badan Kesbangpol
8.01.03. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					991 Orang	353,725,000					Masyarakat Kabupaten Lampung Barat			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.03. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2382 Orang	1,387,067,500	500 Orang	600 Orang	991 Orang	259,808,500	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	991 Orang	707,259,000	Badan Kesbangpol
8.01.03. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Partai	4,182,347,476	30 Partai	40 Partai	10 Partai	1,297,811,772	Kab. LB	DAU			Partai Politik	10 Partai	991,291,149	Badan Kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	70 Perse n	2,529,345,000	50 Perse n	50 Perse n	55 Perse n	545,000,000	Kab. LB	DAU				60 Perse n	599,500,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	70 Perse n	2,529,345,000	50 Perse n	50 Perse n	55 Perse n	545,000,000	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat dan Ormas	60 Perse n	599,500,000	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	76 Doku men	546,978,978	17 Doku men	17 Doku men	19 Doku men	117,858,000	Kab. LB	DAU				19 Doku men	129,643,800	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,644,575,478	400 Orang	500 Orang	135 Orang	354,358,000	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	135 Orang	389,793,800	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	361 -	337,790,544	- -	- lapora n	90 -	72,784,000	Kab. LB	DAU			Ormas	90 -	80,062,400	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	95 Perse n	5,997,610,585	75 Perse n	75 Perse n	80 Perse n	1,468,739,620	Kab. LB	DAU				85 Perse n	1,438,027,482	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	95 Perse n	5,997,610,585	75 Perse n	75 Perse n	80 Perse n	1,468,739,620	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	85 Perse n	1,438,027,482	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Doku men	352,351,000	- Doku men	- 0	1 Doku men	252,351,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	1 Doku men	100,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5920 Orang	4,374,744,066	650 Orang	650 Orang	1000 Orang	942,629,620	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	1640 Orang	1,036,892,582	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.05. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	700 Orang	1,163,210,958	- -	- 0	175 Orang	250,638,000	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	175 Orang	275,701,800	Badan Kesbangpol
8.01.05. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48 laporan	107,304,561	- -	- 0	12 laporan	23,121,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	12 laporan	25,433,100	Badan Kesbangpol
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	95 %	5,588,506,632	75 %	75 %	80 %	1,437,487,500	Kab. LB	DAU			Aparatur	85 %	1,346,637,200	Badan Kesbangpol
8.01.06. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	95 %	5,588,506,632	75 %	75 %	80 %	1,437,487,500	Kab. LB	DAU			Aparatur	85 %	1,346,637,200	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.06. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	407,721,132	- -	- 0	100 Orang	87,852,000	Kab. LB	DAU			Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	100 Orang	96,637,200	Badan Kesbangpol
8.01.06. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	696,150,000	48 laporan	57 laporan	11 laporan	150,000,000	Kab. LB	DAU			Aparatur	11 laporan	165,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.06. 2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 laporan	4,484,635,500	24 laporan	36 Dokumen	4 laporan	1,199,635,500	Kab. LB	DAU			Aparatur	4 laporan	1,085,000,000	Badan Kesbangpol
JUMLAH				33,422,200,779				8,247,890,129						-	8,249,837,142	